

DAFTAR PUSTAKA

A. Primer:

- Asshiddiqie, J., *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Asshiddiqie, J., *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 1* Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2006.
- Asshiddiqie, J., *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II* Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2011
- Atmaja, I.D.G., *Teori Konstitusi dan Konsep Negara Hukum*. Malang: Setara Press, 2015.
- Harkrisnowo, H. dkk., *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2015.
- Sibuea, H.P. *Asas Negara Hukum* Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010.
- Kusnardi, dan Saragih, B.R., *Ilmu Negara*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008.
- Taufiqurrohmah, A *Pengantar Studi Konstitusi Jilid I* Yogyakarta: Pustaka Renaissance, 2012.

B. Sekunder:

- Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Perubahan Keempat).
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik* (Lembaran Negara Nomor 58 Tahun 2008).
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah* (Lembaran Negara Nomor 182 Tahun 2004).
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi* (Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316 Tahun 2003),
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia* (Lembaran Negara Nomor 165 Tahun 1999).
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman* (Lembaran Negara Nomor 8 Tahun 2004).
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi*
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang*

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara*

Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*

Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010).

Kepaniteraan dan Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 20/PUU-XIV/2016*.

Kepaniteraan dan Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 20/PUU-V/2007*.

Kepaniteraan dan Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 52-51-59/PUU-VI/2008*.

Kepaniteraan dan Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 38/PUU-VIII/2010*

Kepaniteraan dan Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 23-26/PUU-VIII/2010*

Kepaniteraan dan Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 38/PUU-VIII/2010*

Kepaniteraan dan Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 39/PUU-XI/2013*

Kepaniteraan dan Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 93/PUU-XII/2014*

Kepaniteraan dan Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 5/PUU-VIII/2010*

Kepaniteraan dan Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008*

Kepaniteraan dan Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 5/PUU-VIII/2010*

Kepaniteraan dan Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 7/PUU-XIII/2015*

Kepaniteraan dan Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 23-26/PUU-VIII/2010*

Kepaniteraan dan Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 38/PUU-VIII/2010*